

KEMISKINAN

Permasalahan dan Alternatif Kebijakan



Ainul Mardiyah, M.Si
Dr. Fitrawaty, M.Si
Randeska Manulang, M.Si

RINGKASAN

Upaya pengentasan dan pengurangan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan dan dilaksanakan secara terpadu. Pendidikan dan kesehatan adalah pelayanan dasar yang harus dipenuhi agar standar hidup masyarakat meningkat. Pemerintah telah mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk sektor pendidikan dan kesehatan sedemikian rupa untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia, tetapi potensi setiap daerah yang berbeda-beda yang menyebabkan ketimpangan pertumbuhan ekonomi juga turut berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan Penelitian ini adalah; untuk menganalisis pengaruh tingkat ketimpangan pertumbuhan ekonomi, anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di seluruh provinsi di Indonesia pada jangka panjang dan jangka pendek.

Penelitian ini, dilakukan dengan mengambil data Indeks Gini Ratio, APBN sektor pendidikan, anggaran kesehatan, tingkat kemiskinan seluruh provinsi di Indonesia dari tahun 2015-2019. Data berasal dari instansi terkait, seperti BI, BPS, BAPPENAS, dan PEMKO, dianalisis dengan Data Panel, sebelum dianalisis, data akan melewati tahapan uji asumsi, seperti, uji model regresi data panel, uji Chow, Uji Hausman, Uji Langrange Multiplier, Uji Signifikansi, Uji Koefisien Determinasi, Uji Autokorelasi, Uji Multikolinieritas dan Uji Heteroskedastisitas.

Hasil analisis Data Panel menunjukkan bahwa seluruh variabel Indeks Gini Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, sedangkan variabel pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Untuk arah penelitian dari seluruh variabel berpengaruh negative terhadap tingkat kemiskinan.

Ketersediaan data yang terbatas menjadi kendala dalam penelitian ini, apalagi variabel anggaran di peroleh dari beberapa pengeluaran kesehatan, sehingga dikhawatirkan kurang akurat.

Penelitian ini orisinal karena menggunakan variabel yang baru, sehingga hasilnya adalah sesuatu yang baru dan bisa dijadikan dasar untuk pengambilan kebijakan.



PRAKATA

Alhamdulillahirabbil'aalamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Tanpa berkah dan petunjuk-Nya, mustahillah penelitian ini terselesaikan tepat waktu mengingat tugas dan kewajiban lain yang bersamaan hadir.

Meneliti merupakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, penulis mencoba menuangkan fenomena yang selalu terjadi dalam masyarakat yaitu “Bagaimana kemiskinan yang terjadi di Indonesia, efek yang ditimbulkan dan apakah kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan mampu mengeluarkan masyarakat Indonesia dari jerat kemiskinan yang terjadi, bagaimana pula ketimpangan di masyarakat, apakah juga menjadi penunjang peningkatan kemiskinan di Indonesia.

Terselesaikannya penelitian ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada Bapak Rektor Universitas Negeri Medan, Bapak Dekan Fakultas Ekonomi, Bapak Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat karena telah memberikan bantuan Dana Penelitian, dengan kepercayaan yang diberikan sehingga penulis dapat meningkatkan kualitas diri. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada keluarga tercinta atas semangat dan doa yang diberikan, tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada mahasiswa yang banyak membantu dalam proses pengumpulan data, semoga dapat memberikan pengalaman meneliti bagi mahasiswa.

Meskipun telah berusaha untuk menghindarkan kesalahan, penulis menyadari juga bahwa penelitian ini masih mempunyai kelemahan sebagai kekurangannya. Karena itu, penulis berharap agar pembaca berkenan menyampaikan kritikan. Dengan segala pengharapan dan keterbukaan, penulis menyampaikan rasa terima kasih dengan setulus-tulusnya. Kritik merupakan perhatian agar dapat menuju kesempurnaan. Akhir kata, penulis berharap agar penelitian ini dapat membawa manfaat kepada pembaca.

Medan, Desember 2020

Penulis

DAFTAR ISI

RINGKASAN.....	i
PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	23
BAB 4. METODE PENELITIAN.....	25
BAB 5. HASIL PENELITIAN.....	34
BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63



DAFTAR TABEL

1.1 Belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi	3
4.1 Kaidah keputusan Durbin-Watson Test.....	28
5.1 Hasil Uji Chow Test.....	50
5.2 Hasil estimasi model persamaan data panel (Fixed Effect Model)	52
5.3 Uji Heterokedastisitas	55
5.4 Uji Multikolinearitas	57



DAFTAR GAMBAR

1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia tahun 2019	2
1.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, 2006-Maret 2020	4
1.3 Jumlah Siswa yang Tidak Sekolah di Indonesia	6
1.4 Ketimpangan pendapatan antar daerah di Indonesia	8
2.1 Skema perangkap kemiskinan	12
4.1 Pengujian pemilihan metode pengolahan data panel	23
4.2 Fish bone diagram	35
5.1 Fluktuasi kemiskinan di Indonesia	34
5.2 Fluktuasi indeks gini rasion di Indonesia	38
5.3 Fluktuasi tingkat pengangguran di Indonesia	40



BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia jelas dituliskan bahwa tujuan dari pemerintah adalah mencapai kesejahteraan masyarakat secara umum. Makna sejahtera yang dituliskan disini tentu sangat lah luas, bukan saja terkait dengan peningkatan pendapatan tetapi juga pemerataan distribusi pendapatan bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga masyarakat bisa sedikit bergeser dari kata “Kemiskinan”.

Menurut Yusuf, 2020, ekonomi bukan hanya membahas tentang pendapatan, penghasilan, atau pertumbuhan ekonomi tetapi Ilmu ekonomi adalah ilmu tentang alokasi. Bagaimana mengalokasikan sumber daya (dalam arti luas pula seperti aset, finansial juga alam, tenaga kerja, pikiran dan lain sebagainya) yang sifatnya terbatas untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (dalam arti luas) setinggi-tingginya. Jadi fungsi tujuan-nya (objective function) adalah kesejahteraan, atau welfare, bukan pendapatan, atau GDP atau pertumbuhan ekonomi. Betul, kesejahteraan adalah fungsi dari pendapatan, tetapi jelas bukan satu-satunya.

Berbagai perencanaan, kebijakan serta program pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan pada intinya adalah mengurangi jumlah penduduk miskin. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensional. Upaya pengentasan dan pengurangan kemiskinan harus dilakukan secara komperhensif, mencakup seluruh aspek hidupan dan dilaksanakan secara terpadu. Menurut Soegijoko, 2001 kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam menikmati hasil pembangunan.

Persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen, lebih rendah 0,25 persen poin terhadap September 2018 dan menurun 0,41 persen poin terhadap Maret 2018. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang, menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018 dan menurun 0,80 juta orang terhadap Maret 2018. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada

September 2018 sebesar 6,89 persen, turun menjadi 6,69 persen pada Maret 2019. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2018 sebesar 13,10 persen, turun menjadi 12,85 persen pada Maret 2019. Dibanding September 2018, jumlah penduduk miskin Maret 2019 di daerah perkotaan turun sebanyak 136,5 ribu orang (dari 10,13 juta orang pada September 2018 menjadi 9,99 juta orang pada Maret 2019). Sementara itu, daerah perdesaan turun sebanyak 393,4 ribu orang (dari 15,54 juta orang pada September 2018 menjadi 15,15 juta orang pada Maret 2019). Garis Kemiskinan pada Maret 2019 tercatat sebesar Rp425.250,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp313.232,- (73,66 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp112.018,- (26,34 persen). Pada Maret 2019, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,68 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp1.990.170,-/rumah tangga miskin/bulan.(Statistik, 2019)



Gambar 1.1. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia tahun 2019

Gambar 1.1 menunjukkan bagaimana sebaran jumlah penduduk miskin di seluruh provinsi di Indonesia. Jumlah penduduk miskin paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat, menyusul Jawa tengah dan Jawa Timur. Data menunjukkan bagaimana provinsi yang padat penduduk memiliki jumlah penduduk miskin yang lebih besar dibanding provinsi

lainnya. Banyak hal yang menyebabkan hal ini terjadi, karena keterbatasan sumber daya yang tersedia dibanding dengan jumlah penduduk yang tidak seimbang. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan adalah rendahnya tingkat kesehatan, tingkat kesehatan yang rendah, daerah yang terisolasi sehingga menyulitkan akses di berbagai sector. (Nurwati, 2008). Pemerintah memandang kesehatan adalah bagian dari kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah memiliki kewajiban penuh untuk menjaga masyarakat agar selalu dalam kesehatan yang baik. Anggaran belanja disektor kesehatan adalah anggaran penting dan prioritas untuk pelayanan kepada masyarakat. Anggaran ini nantinya diperuntukkan untuk pembangunan fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, laboratorium, dana penelitian, dana pendidikan untuk peningkatan kualitas tenaga medis dan fasilitas pendukung lainnya. Berikut adalah data pengeluaran pemerintah selama tahun 2015 - 2020

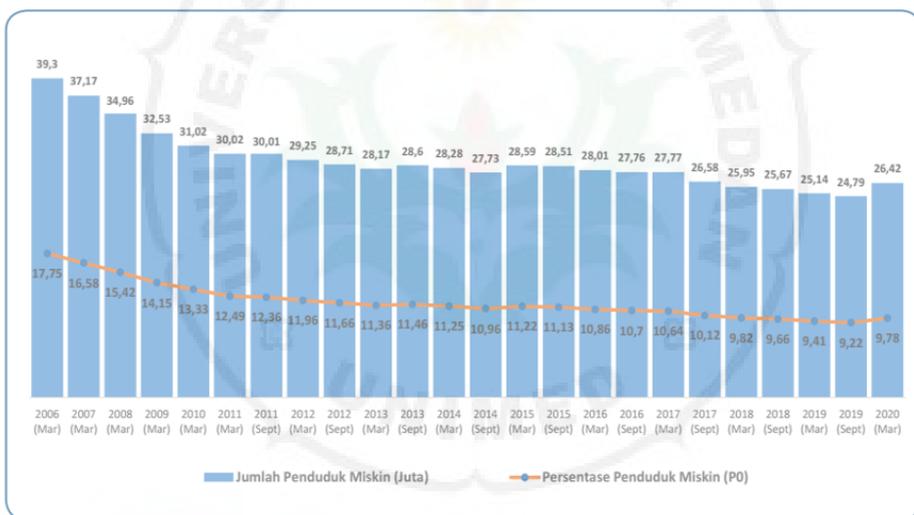
Tabel 1.1 Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi (miliar rupiah), 2005-2020

Fungsi	2015 ¹⁾	2016 ¹⁾	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ²⁾
Pelayanan umum	624.497,70	275.123,40	307.147,20	375.196,10	440.928,10
Pertahanan	105.907,30	98.248,90	117.506,60	106.832,30	107.426,50
Ketertiban dan keamanan	52.941,30	113.349,70	135.748,10	143.305,80	140.660,80
Ekonomi	177.105,20	288.344,90	307.787,50	382.420,90	384.134,40
Lingkungan hidup	9.874,50	8.941,50	10.613,70	13.709,60	14.031,50
Perumahan dan fasilitas umum	16.981,10	27.816,90	27.277,40	32.198,00	21.596,50
Kesehatan	23.225,70	59.639,00	57.225,10	61.869,70	59.675,20
Pariwisata dan budaya	3.166,30	4.379,50	5.770,60	10.700,00	3.891,20
Agama	5.097,90	8.463,20	8.870,40	9.379,00	10.027,00
Pendidikan	143.638,70	131.974,00	138.507,30	145.941,70	149.877,50
Perlindungan social	20.867,80	137.737,30	148.905,50	173.771,60	194.903,10
Jumlah	1.183.303,70	1.154.018,20	1.265.359,40	1.455.324,90	1.527.151,70

Sumber : Kementerian Keuangan

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa anggaran kesehatan merupakan urutan ke enam dibanding pengeluaran pemerintah lainnya, artinya sector

kesehatan adalah sector penting yang diprioritaskan pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jika dilihat realisasi belanja pemerintah disektor kesehatan, pengeluaran pemerintah terus meningkat setiap tahunnya, hal ini menggambarkan bahwa pemerintah ingin masyarakat secara umum berada dalam kesehatan yang baik, tanpa terkecuali. Kesehatan dan kemiskinan adalah dua sisi yang sangat berkaitan, menurunkan tingkat kemiskinan berarti harus meningkatkan kesehatan masyarakat. Keberhasilan pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia memperlihatkan hasil yang baik, berikut adalah data perkembangan jumlah penduduk miskin dan presentasi penduduk miskin 2006 – 2020 di Indonesia.



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 1.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 2006-2020

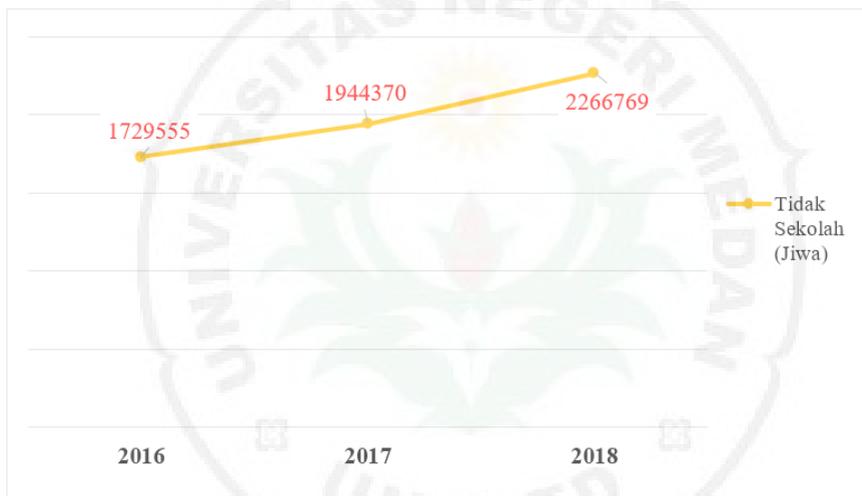
Secara umum, trend data pada Gambar 1.2 menunjukkan telah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia, walaupun tidak bisa dipungkiri masih ada peningkatan di beberapa tahun, misalnya di tahun 2013, 2015 dan tahun 2020, hal ini disebabkan karena kenaikan harga bahan bakar minyak, kenaikan harga bahan pokok dan selanjutnya ditahun 2020 ditambah terjadinya Pandemic Covid-19, tentulah hal ini mengakibatkan kepada penurunan kesejahteraan masyarakat .(BPS, 2020)

Gambar 1.2. menunjukkan bahwa secara perlahan pemerintah sudah menunjukkan kinerja yang baik dalam usaha penurunan tingkat kemiskinan dengan salah satu usahanya adalah peningkatan anggaran kesehatan, yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi yang lebih penting sebenarnya adalah ketimpangan jumlah penduduk miskin antar provinsi di Indonesia. masih begitu terasa, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh anggaran kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di seluruh provinsi di Indonesia.

Menurut Kuncoro 2003, salah satu penyebab kemiskinan adalah perbedaan kualitas sumber daya manusia, ketika sumber daya manusia memiliki produktivitas yang rendah berarti tingkat upah yang diterima juga rendah, akhirnya pendapatan masyarakat juga rendah dan kemiskinan meningkat. Pertumbuhan ekonomi negara ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM), sehingga perlu peningkatan kualitas SDM sebagai sumber inovasi. Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan dengan peningkatan pendidikan bagi masyarakat. Pendidikan merupakan kewajiban bagi pemerintah dalam melaksanakannya. Pemerintah telah membuat program dalam meningkatkan kualitas pendidikan yaitu dengan membuat aturan wajib belajar sembilan tahun untuk seluruh masyarakat Indonesia. Perlu perhatian yang serius dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan.

Pendidikan bukanlah satu hal yang murah, sehingga pemerintah harus membuat anggaran khusus terkait program pendidikan. Pemerintah telah menyediakan dana bantuan operasional (BOS) pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Meskipun kebijakan pemerintah yang mewajibkan masyarakatnya untuk menempuh pendidikan dasar sejak lama dan menanggung biaya pendidikan dasar (pendidikan dasar gratis), tetapi hasil yang diperoleh masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih banyak masyarakat yang tidak bersekolah walaupun sudah memasuki usia sekolah. Berikut jumlah siswa yang tidak bersekolah di Indonesia dari tahun 2016-2018.

Dari gambar 1.3 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang tidak bersekolah di Indonesia terus bertambah setiap tahunnya. Terutama pada tahun 2018 yang merupakan titik tertinggi selama 4 tahun terakhir dengan penduduk yang tidak bersekolah berjumlah 2.266.769 jiwa atau sekitar 8,06%. Banyaknya penduduk yang tidak mengenyam pendidikan dasar ini mengindikasikan masih belum meratanya pendidikan di Indonesia dan kurangnya kinerja pemerintah baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dalam pemerataannya.



Sumber: Kemendikbud (2019)

Sumber: Kemendikbud (2019)

Gambar 1.3 Jumlah Siswa yang Tidak Sekolah di Indonesia

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa dari Anggaran Perencanaan Belanja Negara dapat dilihat bahwa sector pendidikan adalah sector dengan urutan ke tiga terbesar dibanding sector pengeluaran belanja lainnya, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan pendidikan sebagai skala prioritas dalam pembangunan Indonesia, tapi sayangnya hal ini belum membuahkan hasil yang cukup baik

Selanjutnya kuncoro 2003, juga menjelaskan bahwa factor penyebab kemiskinan lain secara makro adalah karena ada ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya antar daerah, sehingga akhirnya menimbulkan distribusi pendapatan yang tidak merata, penduduk miskin hanya memiliki sejumlah sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitas yang rendah. Kepemilikan sumber daya yang berbeda antar daerah sebenarnya bukanlah masalah yang merugikan, .karena sebaaian sumber daya bisa saja belum diekplorasi dengan baik, sehingga belum memberikan hasil yang optimal, tetapi jika nantinya sumber daya itu sudah diekplorasi bisa saja daerah tersebut memberikan hasil yang lebih baik dibanding daerah yang lainnya.

Ketimpangan pendapatan merupakan perbedaan pendapatan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga dalam suatu wilayah yang dipengaruhi oleh tingkat produktivitasnya. Ketimpangan pendapatan akan menjadi masalah, jika suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi sedangkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya dirasakan oleh sebagian kecil penduduk. Ketimpangan ditentukan oleh tingkat pembangunan, heterogenitas etnis, ketimpangan juga berkaitan dengan kediktatoran dan pemerintah yang gagal menghargai property rights (Glaeser 2006).

Ketimpangan pendapatan dapat mempengaruhi tingkat pendidikan (Kaplan et al, 1996 dan Sylwester, 2000). Ketimpangan pendapatan yang besar cenderung mengeluarkan anggaran yang lebih kecil untuk pendidikan sehingga mutu pendidikan menjadi kurang bagus. Salah satu alasan mengapa wilayah dengan tingkat kesenjangan yang tinggi menghabiskan sedikit anggaran untuk pendidikan adalah di wilayah dengan kesenjangan yang meningkat, terjadi perbedaan prioritas antara orang kaya dengan mayoritas warga lainnya (Kaplan et al, 1996). Berikut

data ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2016-2018.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2019

Gambar 1.4 Ketimpangan Pendapatan antar Daerah di Indonesia

Gambar 1.4 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antar daerah di Indonesia yang diukur dengan Indeks Williamson selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan setiap tahunnya, walaupun penurunannya tidak terlalu besar. Penurunan indeks gini ini mengindikasinya semakin meratanya pendistribusian dari pendapatan yang diterima masyarakat antar daerah di Indonesia.

Dari data yang sudah di jelaskan sebelumnya bahwa, kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan belanja negara untuk sector pendidikan dan kesehatan adalah kebijakan yang tepat, karena ternyata kegiatan ini secara simultan mampu mnegurangi tingkat kemiskinan, tapi secara parsial anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan belum optimal dan memberikan hasil yang memuaskan jika dilihat dari penigkatan jumlah siswa yang tidak sekolah dari data 2016 -2018

1.2. Perumusan Masalah

Permasalahan kemiskinan adalah masalah klasik yang tak pernah selesai diseluruh negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Dari perkembangan data yang telah jelaskan sebelumnya walaupun angka kemiskinan menunjukkan penurunan, tetapi jumlah penduduk miskin masih besar dibanding dengan negara lain di dunia, Selanjutnya dalam Word 2000, juga menjelaskan bahwa masyarakat dikatakan miskin, jika akses terhadap kesehatan dan pendidikan nya masih rendah,. Kuncoro 2003, menjelaskan beberapa factor penyebab kemiskinan, antara lain kemiskinan bisa disebabkan kulaitas sumber daya manusia, sehingga ketersediaan sumber daya manusia yang kualitas rendah akan menghasilkan produktivitas rendah, pendapatan rendah dan akhirnya kemiskinan meningkat. Pemerintah mencoba untuk menngkatkan anggaran pendidikan setiap tahunnya tapi sayangnya bahwa usaha pemeruintah belum memberikan hasil yang maksimal, karena dari grafik 1.3 menjelaskan bahwa masih terjadi peningkatan jumlah anak usia sekolah yang tidak sekolah.

Kuncoro 2003 juga menjelaskan bahwa kemiskinan juga terjadi karena keterbatasan akses masyarakat akan pelayanan public, salah satunya pelayanan di sector kesehatan, keterbatasan yang dimaksud adalah tidak tersedianya fasilitas kesehatan secara merata di seluruh daerah di Indonesia, apalagi di daerah pedesaan, kondisi ini menyebabkan tingkat kesehatan masyarakat didaerah pelosok desa lebih buruk dibanding daerah perkotaan. Hal ini jugalah yang menyebabkan tingkat kemiskinan didaerah pedesaan lebih tinggi didaerah kota.

Penyebab kemiskinan berikutnya secara makro adalah karena ada ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya antar daerah, sehingga akhirnya menimbulkan distribusi pendapatan yang tidak merata, penduduk miskin hanya memiliki sejumlah sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitas yang rendah. (Kuncoro, 2003). Luasnya dataran Indonesia dengan topografi yang berbeda mengakibatkan sumber daya di setiap daerah juga berbeda, bagaimana cara mengeksplorasikan kekayaan alam Indonesia sangat tergantung kepada kualitas sumber daya yang tersedia didaerah tersebut. Ketika sumber daya manusia mampu

mengelola dengan baik seluruh sumber daya alam yang tersedia maka tentu saja ini menjadis sumber penghasilan bagi masyarakat, tetapi jika sebaliknya, hal ini menjadi tidak berarti dan tingkat kemiskinan di daerah tersebut akan semakin meningkat.



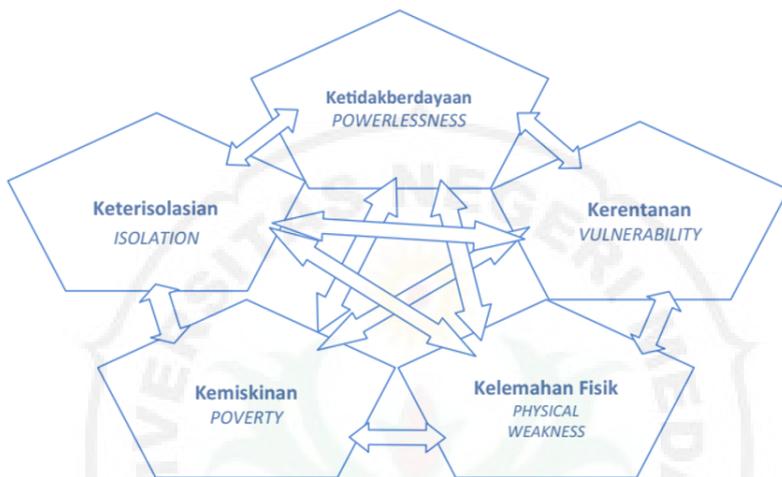
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep dan Defenisi Kemiskinan

Kemiskinan memiliki konsep yang beragam. World Bank mendefinisikan kemiskinan dengan menggunakan ukuran kemampuan/ daya beli yaitu US \$1 atau US \$2 per kapita per hari. Sementara itu, BPS mendefinisikan kemiskinan didasarkan pada garis kemiskinan, (poverty line). Nilai garis kemiskinan yang digunakan untuk menentukan kemiskinan mengacu pada kebutuhan minimum yang dibutuhkan oleh seseorang yaitu 21,00 kalori per kapita per hari, ditambah dengan kebutuhan minuman non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang yang meliputi; papan, sandang, sekolah, transportasi, seluruh kebutuhan rumah tangga dan individu yang mendasarinya. Menurut BPS, seseorang dikatakan miskin jika pengeluarannya lebih rendah dari Garis Kemiskinan. Berbeda dengan yang disampaikan Bappenas (2004) adalah konsidi dimana seseorang atau sekelompok orang laki dan perempuan, yang tidak mampu untuk memenuhi hak-hak dasarnya meliputi: kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan social politik.

Secara umum, konsep kemiskinan dapat dibedakan ke dalam dua jenis yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kondisi ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin. Sedangkan kemiskinan relatif adalah kondisi yang disebabkan oleh pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan seseorang lebih miskin dibandingkan dengan lainnya. Kondisi ini terjadi apabila antarkelompok pendapatan menunjukkan fenomena ketimpangan. Dalam menentukan kelompok penduduk miskin, standar minimum pengukuran

kemiskinan disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu yang berfokus pada kelompok penduduk “termiskin”, misalnya 20 persen atau 40 persen (Bappenas, 2018).



Sumber: Robert Chambers (1984) *Rural Development: putting the last first*, p. 112.

Gambar 2.1 Skema Perangkap Kemiskinan (Chambers, 1994)

Lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut besaran pendapatan/pengeluaran. Kelompok inilah yang didefinisikan sebagai kelompok relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada kondisi distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk. Pemahaman tentang kemiskinan, termasuk didalamnya terkait bagaimana mengukur kemiskinan, terus mengalami perkembangan. Robert Chambers (1984) misalnya, mengemukakan pandangannya tentang kemiskinan khususnya di wilayah perdesaan. Menurutnya, kemiskinan merupakan kluster dari berbagai kondisi kurang menguntungkan yang saling berkaitan satu sama lain, dan menyebabkan seseorang terperangkap serta sulit keluar dari kondisi kemiskinan. Kondisi kurang menguntungkan tersebut meliputi kelemahan fisik, kerentanan terhadap guncangan, keterisolasian, ketidakberdayaan, dan kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan tidak lagi terbatas hanya pada aspek ekonomi semata, melainkan lebih luas lagi atau yang dikenal sebagai kemiskinan pendapatan. Kemiskinan selama ini sering dikonsepsikan dalam konteks ekonomi yaitu ketidakcukupan pendapatan

dan aset untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Tetapi sebenarnya pengertian kemiskinan jauh lebih luas dari sekedar penurunan pendapatan dan aset sebagaimana Bank Dunia mendefinisikan sebagai berikut:

“Kemiskinan berkaitan dengan ketiadaan tempat tinggal, rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan berkaitan dengan ketiadaan lapangan pekerjaan. Kemiskinan berkaitan dengan kehilangan anak karena penyakit yang disebabkan oleh ketiadaan akses terhadap air bersih. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, dan kurangnya keterwakilan atau representasi, dan kebebasan” Lebih lanjut, menurut Amartya Sen (1999), kemiskinan tidak cukup hanya diukur dengan ukuran pendapatan saja, tetapi juga terkait hilangnya kapabilitas (deprivasi kapabilitas). Kapabilitas merupakan kebebasan seseorang untuk menjalankan fungsinya (keberfungsian) sebagai manusia. Hal ini menentukan apa yang akan dilakukannya terhadap sumber daya yang dimilikinya. Kapabilitas seseorang untuk menjalankan fungsinya tersebut dapat menentukan status seseorang apakah termasuk dalam kategori miskin atau tidak. Untuk mengatasi deprivasi kapabilitas, diperlukan investasi sumber daya manusia dan peningkatan peranan pemerintah.

Selain pengukuran kemiskinan yang telah disebutkan, kemiskinan juga dapat dibedakan berdasarkan faktor penyebabnya yaitu: (1) kemiskinan alamiah; (2) kemiskinan struktural; dan 3) kemiskinan kultural. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terjadi karena faktor alam dan geografis yang tidak mendukung, misalnya karena kondisi alam yang gersang (kering dan tidak teratur), sumber daya alam yang terbatas, dan wilayah yang terisolasi. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi akibat kesalahan dalam kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, kebijakan ‘urban bias’ yang didefinisikan oleh Michael Lipton (1977) sebagai penyebab dari tetap tingginya kemiskinan di daerah pedesaan. Sedangkan kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang terjadi akibat faktor sosial kultural di suatu masyarakat. Dengan adanya faktor-faktor sosial kultural tersebut, masyarakat semakin terperangkap di dalam kondisi kemiskinan dan seolah-olah telah menjadi budaya masyarakat. Oscar Lewis menyebutnya sebagai budaya kemiskinan.

2.2. Penyebab Kemiskinan

Menurut Spicker dalam Maipita (2014:60) berpendapat bahwa penyebab kemiskinan dapat dibagi dalam empat mazhab, yaitu :

- Individual explanation, mazhab ini berpendapat bahwa kemiskinan cenderung diakibatkan oleh karakteristik orang miskin itu sendiri. Karakteristik yang dimaksud dalam bekerja. Mereka juga sering salah dalam memilih, termasuk memilih pekerjaan, memilih jalan hidup, memilih tempat tinggal, memilih sekolah, dan lainnya.
- Familial explanation, mazhab ini berpendapat bahwa kemiskinan lebih disebabkan oleh faktor keturunan. Tingkat pendidikan orang tua yang rendah telah membawa dia ke dalam kemiskinan. Akibatnya ia juga tidak mampu memberikan pendidikan yang layak kepada anaknya, sehingga anaknya juga akan jatuh pada kemiskinan. Demikian secara terus menerus dan turun temurun.
- Subcultural explanation, menurut mazhab ini bahwa kemiskinan dapat disebabkan oleh kultur, kebiasaan, adat istiadat, atau akibat karakteristik perilaku lingkungan. Misalnya, kebiasaan yang bekerja adalah kaum perempuan, kebiasaan yang enggak untuk bekerja keras dan menerima apa adanya, keyakinan bahwa mengabdikan kepada para raja atau orang terhormat meski tidak diberi bayaran dan lainnya yang berakibat pada kemiskinan. Terkadang orang seperti ini justru tidak merasa miskin karena sudah terbiasa dan memang budayanya yang membuat demikian.
- Structural explanation, mazhab ini menganggap bahwa kemiskinan timbul akibat dari ketidakseimbangan, perbedaan status yang dibuat oleh adat istiadat, kebijakan, dan aturanlain menimbulkan perbedaan hak untuk bekerja, sekolah dan lainnya hingga menimbulkan kemiskinan di antara mereka yang statusnya rendah dan haknya terbatas.

Kemiskinan secara umum disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang datang dari dalam diri orang miskin, seperti sikap yang menerima apa adanya, tidak bersungguh-sungguh dalam berusaha, dan kondisi fisik yang kurang sempurna. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar diri si miskin, seperti keterkucilan karena akses yang terbatas, kurangnya lapangan kerja, ketiadaan kesempatan, sumberdaya alam yang terbatas. Sebahagian besar faktor yang menyebabkan orang miskin adalah faktor eksternal. Beberapa faktor penyebab kemiskinan lainnya adalah pertumbuhan ekonomi lokal dan global yang rendah, tingkat pendidikan dan penguasaan teknologi yang rendah, sumberdaya alam yang terbatas, pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan stabilitas politik yang tidak kondusif (Maipita, 2018)

Dalam tataran konsep, terdapat beberapa kelompok pandangan yang mengidentifikasi penyebab kemiskinan terutama di wilayah perdesaan. Konsep ini akan memperkaya pembahasan evaluasi penyebab kemiskinan khususnya pada wilayah dengan kemiskinan tinggi. Beberapa pandangan penyebab kemiskinan antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, adalah kelompok pandangan ekonomi politik. Kelompok ini berpendapat bahwa munculnya kemiskinan perdesaan merupakan hasil dari proses pengkonsentrasian kekayaan dan kekuasaan. Proses tersebut terjadi melalui tiga tingkatan, yaitu:

- Tingkat global, munculnya kemiskinan merupakan akibat hubungan pertukaran yang eksploitatif dan tidak seimbang antara negara kaya dan negara miskin sehingga negara miskin akan tetap menjadi miskin, meskipun tetap memperoleh manfaat dari investasi modal;
- Tingkat nasional, kemiskinan perdesaan muncul Rumah tangga miskin cenderung memiliki ukuran keluarga yang besar dengan jumlah anak yang lebih banyak. Namun dengan pendapatan anggota keluarga yang terbatas sebagai akibat dari ulah beberapa kelompok kepentingan terutama kelompok kepentingan perkotaan, seperti kelompok berpendapatan menengah di perkotaan yang berusaha memperoleh keuntungan dengan mengorbankan kepentingan penduduk desa; dan

- Tingkat lokal, kemiskinan perdesaan muncul sebagai akibat dari ulah para elit lokal - yang terdiri dari tuan tanah, pedagang, pelepas uang (money lenders), dan birokrat - yang terus mengkonsolidasikan kekuasaan dan kekayaan mereka. Kedua, adalah kelompok pandangan ekologi. Kelompok ini melihat kemiskinan di perdesaan sebagai akibat dari pertumbuhan dan tekanan penduduk yang tidak terkendali atas sumber daya dan lingkungan. Adanya tekanan penduduk menyebabkan usaha pertanian menjadi semakin sempit. Hal ini mengakibatkan upah riil turun dan jumlah pengangguran meningkat. Sebagian tenaga kerja terpaksa harus bermigrasi ke daerah perkotaan dan lingkungan marginal. Selain itu, para ahli ekologi fisik juga melihat karakteristik fisik dari kelompok miskin seperti kurang gizi, kondisi lingkungan yang tidak sehat, perumahan yang kurang layak, lingkungan yang kurang nyaman, dan kondisi iklim yang tidak menentu menjadi penyebab kemiskinan di perdesaan (Chambers, 1983). Kemiskinan juga disebabkan oleh kekurangan modal dalam arti luas. Sachs (2005) dalam bukunya *The End of Poverty*, menyatakan bahwa mereka yang termiskin dari yang miskin (miskin ekstrem) umumnya tidak memiliki salah satu dari enam jenis modal (SDM, bisnis, infrastruktur, sumber daya alam, kelembagaan publik, dan pengetahuan) yang menyebabkan kelompok miskin tersebut terperangkap ke dalam perangkap kemiskinan.

Dari berbagai pendapat para ahli, berbagai faktor penyebab kemiskinan, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa faktor yaitu:

- Faktor kondisi alam dan lingkungan, seperti meningkatnya kerusakan lingkungan, distribusi sumber daya yang tidak merata, dan bencana alam yang sering terjadi.
- Faktor penduduk, yaitu tingginya pertumbuhan penduduk sehingga menekan sumber daya alam dan adanya migrasi penduduk dari perdesaan ke perkotaan.
- Faktor eksploitasi yang terjadi antarkelas, antarkelompok, antarwilayah, dan antarnegara, termasuk adanya hubungan ekonomi internasional yang tidak seimbang antara negara maju

dan negara berkembang. karakteristik fisik dari kelompok miskin seperti kurang gizi, kondisi lingkungan yang tidak sehat, perumahan yang kurang layak, lingkungan yang kurang nyaman, dan kondisi iklim yang tidak menentu menjadi penyebab kemiskinan di perdesaan

- Faktor kelembagaan dan struktural seperti adanya berbagai kebijakan pemerintah yang tidak tepat dan cenderung mengabaikan daerah perdesaan.
- Faktor teknologi yang merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mendorong dan meningkatkan produktivitas usaha tani atau pertanian, yang juga merupakan mata pencaharian utama dari mayoritas penduduk perdesaan termasuk di dalamnya penduduk miskin di negara berkembang (Bappenas, 2018).

2.3. Ketimpangan Pendidikan

Menurut Yagami (2013) ketimpangan pendidikan adalah ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya atau apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Artinya pembangunan pendidikan harus merata tanpa perbedaan apapun, agar rakyat atau masyarakat dapat menikmati pendidikan yang layak dan bermutu.

Ketimpangan pendidikan menjadi sangat penting dalam mengetahui efektifitas dari sistem pendidikan dan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi proses pendidikan. Beberapa alasan mengapa ketimpangan pendidikan menjadi hal yang perlu untuk diteliti karena adanya keterkaitan antara kesejahteraan dan efisiensi. Dari sisi kesejahteraan, pendidikan yang berkualitas mampu meningkatkan kemampuan individu dalam memperkuat kesejahterannya secara langsung. Meskipun masih ditemui adanya gap pendidikan antara si kaya dan si miskin. Jika kondisi kemiskinan dianggap sebagai “perampasan dari pemenuhan kebutuhan minimum pendidikan yaitu sekolah dasar”, maka ketimpangan kesejahteraan harus memasukkan ukuran ketimpangan pendidikan (Sen, 2000).

Menurut BPS (2019) indikator pencapaian pendidikan dapat dilihat dari angka rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi sekolah. Namun, peningkatan pencapaian tersebut belum tentu mengimplikasikan pendidikan yang merata. Thomas et al (2001) menyatakan bahwa indikator pendidikan kurang efektif dalam menggambarkan ketimpangan pendidikan. Oleh karena itu perlu ukuran ketimpangan pendidikan lainnya seperti indeks gini pendidikan.

Thomas (2001) Proporsi kumulatif populasi pada masing-masing tingkatan mengikuti perhitungan sebagai berikut:

Tidak sekolah	: $Q_1 = P_1$				
Tidak Tamat SD	: $Q_2 = P_1$	+ P_2			
Tamat SD	: $Q_3 = P_1$	+ $P_2 + P_3$			
Tamat SMP	: $Q_4 = P_1$	+ P_2	+ P_3	+ P_4	
Tamat SMA	: $Q_5 = P_1$	+ P_2	+ P_3	+ P_4	+ P_5
Tamat Universitas	: $Q_6 = P_1$	+ P_2	+ P_3	+ P_4	+ $P_5 + P_6 = 100\%$

Indeks gini pendidikan dapat digunakan untuk menghitung tingkat ketimpangan (ketidakmerataan) agregat pendidikan. Sedangkan kriteria ketimpangan atau pemerataan pendidikan dengan menggunakan indeks gini pendidikan menurut Thomas et al (2001) adalah:

0,6 – 0,1 = Ketimpangan tinggi

0,3 – 0,59 = Ketimpangan sedang

0,0 – 0,29 = Ketimpangan rendah

2.4. Ketimpangan Wilayah

Ketidakseimbangan dalam pembangunan ekonomi suatu daerah biasanya terjadi kalau hanya diserahkan kepada kekuatan-kekuatan mekanisme pasar. Perkembangan ekonomi daerah yang diserahkan pada kekuatan-kekuatan mekanisme pasar cenderung memperbesar ketidakmerataan pembangunan antar wilayah. Sebab dalam kenyataan,

kegiatan dan perkembangan ekonomi lebih sering terjadi dan terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu saja. Sebaliknya, pada wilayah lain yang nampak terjadi hanyalah semakin ketertinggalan saja. Pesatnya perkembangan ekonomi suatu wilayah akan kurang menguntungkan untuk wilayah-wilayah lainnya karena terjadi ketertarikan sumberdaya. Realitanya, tenaga kerja, modal, perdagangan akan mengalir pada wilayah-wilayah yang berkembang lebih cepat. Sebagai contoh, tenaga kerja produktif dan profesional akan bermigrasi ke wilayah-wilayah yang kegiatan ekonominya berkembang cepat.

Mengalirnya sumber daya-sumber daya pada wilayah yang ekonominya berkembang pesat memperlambat berkembangnya wilayah-wilayah lain yang kehilangan sumberdaya seperti tenaga kerja, sumberdaya alam, dan modal (Bakri, dkk, 2015) Menurut (Arsyad, 2014) mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara-negara sedang berkembang, yaitu:

- Pertambahan penduduk yang tinggi sehingga mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita. Inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang.
- Ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Investasi yang banyak dilakukan pada proyek-proyek yang padat modal (capital intensive), sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga menambah jumlah pengangguran.
- Rendahnya mobilitas sosial.
- Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga barang hasil industri untuk melindungi usaha golongan kapitalis.
- Kondisi memburuknya nilai tukar (term of trade) bagi negara yang sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara maju, sebagai akibat ketidak elastisan permintaan negara-negara terhadap ekspor negara yang sedang berkembang.
- Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain sebagainya.

Salah satu cara yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan ekonomi regional antar Kabupaten atau Kota adalah dengan Indeks Williamson. Williamson dalam (Kuncoro, 2004) meneliti hubungan antar disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi negara yang sudah maju dan yang sedang berkembang. Disparitas ekonomi regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih ‘matang’ dilihat dari pertumbuhan ekonomi tampak adanya keseimbangan antardaerah dan disparitas berkurang dengan signifikan.

Besarnya indeks williamson ini bernilai positif dan berkisar antara angka nol sampai dengan satu. Semakin besar nilai indeks ini (mendekati angka satu) berarti semakin besar tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah dalam wilayah tersebut. Sebaliknya semakin kecil nilai indeks ini (mendekati angka nol) berarti semakin merata tingkat pemerataan pendapatan antar daerah dalam wilayah tersebut. Kuncoro (2004) menetapkan kriteria untuk mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah, apakah ada ketimpangan tinggi, sedang atau rendah. Untuk itu ditentukan kriteria sebagai berikut:

- Ketimpangan tinggi jika $IW > 0,5$
- Ketimpangan sedang jika $IW = 0,35 - 0,5$
- Ketimpangan rendah jika $IW < 0,35$.

2.5. Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan Dan Kesehatan

Pengeluaran pemerintah merupakan cerminan kebijakan yang pemerintah lakukan, yaitu jika pemerintah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut..

Menurut Suparmoko dalam (Sumadio and Rambli, 2010) bahwa pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

- Pengeluaran itu merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi dimasa yang akan datang.

- Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat.
- Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang.
- Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas.

Sedangkan macam-macam pengeluaran pemerintah, yaitu:

- Pengeluaran yang self liquidating sebagian atau sepenuhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa-jasa dan barang-barang yang bersangkutan. Misalnya pengeluaran untuk jasa-jasa perusahaan pemerintah atau untuk proyek-proyek produktif.
- Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan-keuntungan ekonomi bagi masyarakat yang dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak yang lain akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah. Misalnya pengeluaran untuk bidang pertanian, pendidikan, dan pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja, serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat.
- Pengeluaran yang tidak termasuk self liquidating dan reproduktif, yaitu pengeluaran yang langsung menambahkan kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya untuk bidang rekreasi, pendirian monument dan sebagainya.
- Pengeluaran yang merupakan penghematan dimasa akan datang, misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu, pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin pada dasarnya berunsurkan pos-pos pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan roda pemerintahan sehari-hari meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga barang), angsuran dan utang pemerintah, serta jumlah pengeluaran lain. Sedangkan pengeluaran pembangunan maksudnya adalah pengeluaran

yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik, yang dibedakan atas pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek



BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

Beberapa hal yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk menganalisis pengaruh anggaran kesehatan, anggaran pendidikan dan ketimpangan distribusi pendapatan yang diukur dengan indeks gini ratio terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia
- Untuk menganalisis pengaruh anggaran kesehatan, anggaran pendidikan dan ketimpangan distribusi pendapatan yang diukur dengan indeks gini ratio terhadap tingkat kemiskinan antar provinsi di Indonesia
- Membentuk Model Kemiskinan di Indonesia dan seluruh provinsi di Indonesia
- Menghasilkan rekomendasi pengentasan kemiskinan terkait dengan pengeluaran bidang pendidikan, kesehatan dan ketimpangan distribusi pendapatan antara provinsi di Indonesia
- Menghasilkan luaran berupa publikasi pada jurnal terakreditasi nasional, prosiding internasional yang terakreditasi dan draft buku sebagai pendukung bahan ajar.

3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan pengambil kebijakan, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- Untuk memperkaya dan menambah khsanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kajian bahan ajar guna meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya yang berkaitan dengan Kemiskinan dan Ketimpangan.
- Dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan bahan acuan bagi pengambil kebijakan dalam mengatasi masalah perekonomian di Indonesia

2. Manfaat Praktis

- Bagi dosen, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menjelaskan tentang fenomena kemiskinan antar provinsi di Indonesia
- Bagi mahasiswa, adanya variasi bahan ajar sebagai sumber pembelajaran yang dapat membantu mahasiswa dalam meningkatkan kompetensi khususnya dalam pengantar ekonomi makro
- Bagi lembaga, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai alternatif lain dalam menentukan bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran pengantar ekonomi makro . bahasan pertumbuhan ekonomi.
- Bagi peneliti, hasil penelitian ini merupakan paengalaman bermanfaat dalam menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan keterampilan, serta bermanfaat bagi lembaga tempat bekerja guna memberikan motivasi dan semangat kerja serta perbaikan pelayanan pembelajaran bagi mahasiswa

BAB 4. METODE PENELITIAN

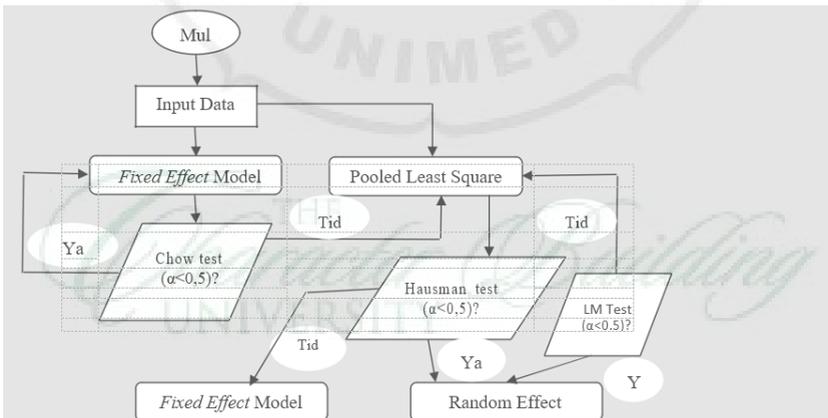
4.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan menganalisis Tingkat Kemiskinan, Ketimpangan Pendidikan, Ketimpangan Pembangunan Wilayah dan Pengeluaran Pemerintah di bidang Pendidikan dan Kesehatan seluruh provinsi di Indonesia selama tahun 2010 -2019

4.2 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber yang terkait, karena penelitian ini menggunakan data sekunder, data diambil dari Kemenkeu, Badan Pusat Statistik Indonesia, dan sumber-sumber lain yang terkait dalam penelitian. Selain itu digunakan metode survey, untuk data yang tidak didapatkan dengan metode dokumentasi.

4.3 Desain Penelitian



Sumber : (Hsiao, 2016)

Gambar 4.1. Pengujian Pemilihan Metode Pengolahan Data Panel

4.4 Analisis Uji Asumsi

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier berganda yang berbasis Ordinary Least Square (OLS). Uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi. Metode OLS akan menghasilkan penduga yang Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) apabila model yang digunakan memenuhi asumsi berikut :

- $E(\epsilon_i) = 0$, untuk setiap i
Nilai rata-rata kesalahan pengganggu adalah nol untuk $i = 1, 2, \dots, n$
- $Cov(\epsilon_i, \epsilon_j) = 0, i \neq j$
Tidak ada autokorelasi antar kesalahan pengganggu
- $Var(\epsilon_i) = \sigma^2$
Varian sama untuk semua kesalahan pengganggu (asumsi homoskedastisitas).
- $Cov(\epsilon_i | X_{2i}) = Cov(\epsilon_i | X_{3i}) = 0$
Tidak ada korelasi antara setiap perubahan bebas X dengan kesalahan pengganggu X_i .
- Tidak ada kolinearitas ganda (multicollinearity) diantara variabel bebas

4.4.1. Uji Autokorelasi

Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antara anggota observasi dalam beberapa deret waktu (serial correlation) atau antara anggota observasi berbagai objek atau ruang (spatial correlation). Autokorelasi terjadi disebabkan karena faktor kelambanan data ekonomi, bias spesifikasi mengeluarkan variabel yang relevan dari model, bias spesifikasi bentuk fungsional, tenggang waktu atau lag, manipulasi data, transformasi data, dan non-stasioneritas dalam model (Manurung, dkk, 2005).

Metode yang digunakan untuk mendeteksi autokorelasi dilakukan dengan empat cara, yaitu Metode Grafik, Run Test, Durbin-Watson d Test, dan the Breusch-Godfrey Test.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Durbin-Watson d Test.

Autoregression atau AR, yaitu : diperoleh dari nilai koefisien rho sebagai berikut :

$$\rho = \frac{\sum_{t=1}^T \varepsilon_t \varepsilon_{t-1}}{\sum_{t=1}^T \varepsilon_t^2} \quad \text{atau} \quad \rho = 1 - 0.5d \quad \text{sehingga} \quad d \approx 2(1 - \rho)$$

$$d = \frac{\sum_{t=1}^T (\varepsilon_t - \varepsilon_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^T \varepsilon_t^2}$$

Jika $-1 \leq \rho \leq 1$ dan $d \approx 2(1 - \rho)$ maka batas nilai statistik d adalah $0 \leq d \leq 4$

Jika $\rho = 0$ maka $d \approx 2$, artinya tidak ada korelasi serial.

Jika $\rho = +1$ maka $d \approx 0$, artinya terjadi korelasi serial positif sempurna.

Jika $\rho = -1$ maka $d \approx 4$, artinya terjadi korelasi serial negatif sempurna.

Tabel 4.1. Kaidan Keputusan *Durbin-Watson Test*

Jika	Keputusan	Kesimpulan
$0 < d < d_L$	Tolak	Terdapat autokorelasi positif
$d_L \leq d \leq d_U$	Tidak dapat disimpulkan	Tidak dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi positif
$4 - d_L \leq d \leq 4$	Tolak	Terdapat autokorelasi negatif
$4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$	Tidak dapat disimpulkan	Tidak dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi negatif
$d_U \leq d \leq 4 - d_U$	Tidak ditolak	Tidak ada autokorelasi positif atau autokorelasi negatif

4.4.2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah ada hubungan linier sempurna antara variabel bebas dari suatu model regresi. (Firdaus, 2011). Multikolinearitas terjadi disebabkan karena antara lain metode pengumpulan data yang digunakan membatasi nilai dari variabel regressor, kendala-kendala model pada populasi yang diamati, spesifikasi model, penentuan jumlah variabel bebas yang lebih banyak dari jumlah observasi, dan data time series.

Metode yang dilakukan untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dalam penelitian adalah dengan melihat nilai variance inflating factor (VIF), yaitu:

$$VIF = \frac{1}{1 - r_{12}^2}$$

dimana:

$$r_{12}^2 = \text{koefisien korelasi antara X1 dan X2}$$

VIF menunjukkan varian yang ditaksir meningkat akibat keberadaan multikolinieritas. Varian koefisien model regresi secara langsung proporsional dengan VIF. Invers atau kebalikan dari VIF adalah tolerance (TOL), yaitu:

$$TOL = \frac{1}{VIF} = 1 - R_j^2$$

dimana :

$$R_j^2 = \text{koefisien korelasi}$$

$$R_j^2 = 1 \text{ (multikolinieritas sempurna), TOL} = 0$$

$$R_j^2 = 0 \text{ (tidak ada multikolinieritas), TOL} = 1$$

Nilai VIF yang semakin besar menunjukkan masalah multikolinieritas yang semakin serius. Kaidah yang digunakan adalah jika VIF lebih besar dari 10 dan lebih besar dari 0,90 maka variabel tersebut memiliki kolinieritas yang tinggi.

4.4.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas, menguji apakah variabel gangguan (disturbance/error terms) yang muncul dalam fungsi regresi memiliki varians yang sama atau tidak. Model analisis yang baik adalah jika varians gangguan adalah sama (homoskedastik). Asumsi homoskedastisitas dari kejutan acak adalah selisih atau spread or scedasticity sama atau equal or homo atau varians sama [2]. Secara simbolis homoskedastisitas dan heteroskedastisitas masing-masing dituliskan sebagai berikut:

$$E[\varepsilon_t^2] = \sigma^2 \quad t = 1, 2, \dots, T$$

$$E[\varepsilon_i^2] = \sigma_i^2 \quad t = 1, 2, \dots, T$$

Perbedaan antara homoskedastisitas dan heteroskedastisitas dapat dilihat dari sumber-sumber penyebab heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan metode Gambar (Gujarati, 2003), yakni:

- Jika terdapat pola tertentu pada penyebaran titik-titik variabel gangguan, maka telah terjadi heteroskedastisitas.
- Sebaliknya, jika tidak terdapat pola yang jelas, titik-titik variabel gangguan menyebar di atas dan di bawah 0 (nol), maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.5 Metode Analisis Data dan Model Penelitian

Metode yang digunakan peneliti adalah regresi dengan menggunakan data panel (pooled data) atau disebut model regresi data panel. Sebelum mengetahui pemodelan regresi data panel, maka perlu dikaji model regresi linier menggunakan data cross section dan time series.

Model dengan data cross section

$$Y_i = \alpha + \beta X_i + \varepsilon_i ; i = 1, 2, \dots, N \quad \dots \dots \dots (3.1)$$

N : banyaknya data cross section

Model dengan data time series

$$Y_t = \alpha + \beta X_t + \varepsilon_t ; t = 1, 2, \dots, T \quad \dots \dots \dots (3.2)$$

N : banyaknya data time series

Mengingat data panel merupakan gabungan dari data time series (antar waktu) dan data cross section (antar individu/ruang), maka dalam model data panel, unit cross section yang sama di survei dalam beberapa waktu (Gujarati, 2003: 637) dan model data panel dapat dituliskan dengan:

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \varepsilon_{it} ; i = 1, 2, \dots, N; t = 1, 2, \dots, T \quad \dots \dots \dots (3.3)$$

Dimana :

i = banyaknya observasi

t = banyaknya waktu

$i \times t$ = banyaknya data panel

Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain metode Kuadrat Terkecil Biasa (Pooled Least Square/PLS), Model Efek Tetap (Fixed Effect Model/FEM), dan Model Efek Random (Random Effect Model/REM).

Analisis Data Panel dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis dampak fluktuasi jumlah penduduk, upah minimum regional, harga beras, tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat inflasi kabupaten dan kotamadya di Sumatera Utara. Dari variable yang digunakan , maka dapat dibentuk model penelitian sebagai sebagai berikut:

Analisis Data Panel dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis dampak fluktuasi tingkat ketimpangan pendidikan, tingkat ketimpangan wilayah dan pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan dan kesehatan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten dan kotamadya di Sumatera Utara. Dari variable yang digunakan , maka dapat dibentuk model penelitian sebagai sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon_{it} \dots\dots\dots(3.4)$$

Dimana:

Y_{it} = Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)

X_1 = Indeks Gini Ratio

X_2 = Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan

X_3 = Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

Ait = Intercept (Konstanta)

Eit = Kesalahan pengganggu

4.6. Defenisi Operasional

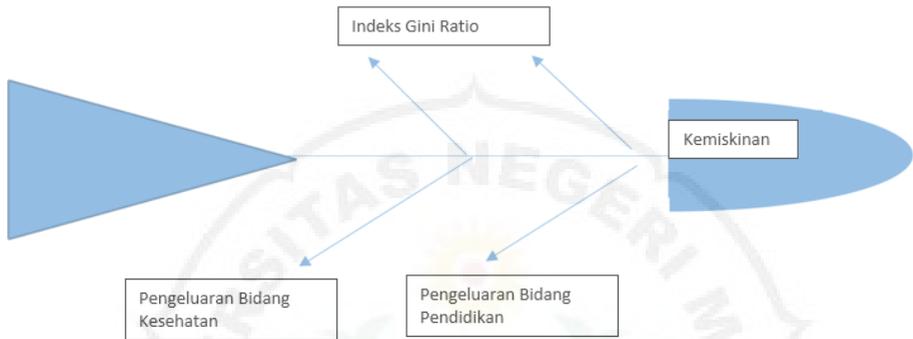
Berikut adalah definisi operasional dari seluruh variabel yang digunakan di dalam model empiris:

- Kemiskinan adalah ketidakmampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) yang dilihat dari rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.
- Ketimpangan Pembangunan Wilayah Indeks Gini Ratio adalah Indeks mengukur ketimpangan pembangunan atau disparitas adalah perbedaan pembangunan antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya di Sumatera Utara secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan disparitas atau ketidak pemerataan pembangunan.
- Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan

Pengeluaran pemerintah atas pendidikan adalah merupakan besarnya pengeluaran pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk sektor pendidikan yang mencerminkan pengeluaran pemerintah dari total belanja yang dialokasikan untuk sektor pendidikan. Variabel tersebut dihitung dalam satuan milyar.

- Pengeluaran pemerintah atas kesehatan adalah besarnya alokasi belanja kesehatan pemerintah yang mencerminkan pengeluaran pemerintah dari total belanja yang dialokasikan untuk sektor kesehatan. Variabel tersebut dihitung dalam satuan milyar.

4.7. Fish Bone Diagram Penelitian



Gambar 4.2. Fish Bone Diagram

BAB 5. HASIL PENELITIAN

5.1. Faktor Penyebab Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan adalah Indeks mengukur ketimpangan pembangunan atau disparitas adalah perbedaan pembangunan antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya di Sumatera Utara secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan disparitas atau ketidak pemerataan pembangunan.



Gambar 5.1. Fluktuasi Kemiskinan di Indonesia

Dari gambar 1 dapat dilihat bahwa ketimpangan atau dalam hal ini diukur dengan indeks Williamson pada periode 2010-2017 cenderung meningkat, artinya distribusi pembangunan dan pertumbuhan di Indonesia semakin tidak merata. Peningkatan ketimpangan dimulai pada tahun 2011 selanjutnya ketimpangan terus meningkat hingga tahun 2017. Peningkatan yang sangat besar ini bisa disebabkan oleh banyak hal, salah satunya adalah sumber daya manusia baik dari sisi jumlah maupun dari sisi kualitas. Sumber daya manusia sebagai objek sekaligus subjek dalam

pembangunan, memegang peranan penting demi tercapainya tujuan suatu negara.

Peningkatan pendapatan nasional juga merupakan tujuan nasional, namun terkadang lupa bahwa distribusi pendapatan itu juga penting sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai. Bertumpuknya seluruh factor produksi di daerah perkotaan karena lengkapnya sarana dan prasarana di kota, mengakibatkan desa dan seluruh pelosok wilayah di Indonesia menjadi lumbung kemiskinan, sehingga ketimpangan semakin meningkat.

Ketimpangan pada dasarnya disebabkan adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini kemampuan pada suatu daerah dalam mendorong pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu tidaklah mengherankan bilamana pada suatu daerah biasanya terdapat daerah yang maju (*developed region*) dan wilayah terbelakang (*Underdeveloped Region*). Ketimpangan pembangunan juga dapat dilihat secara horizontal yakni perbedaan antara daerah maju dan terbelakang (Sjafrizal, 2018).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini menduduki urutan ketiga tercepat di antara negara-negara anggota G-20. Statistik terbaru menunjukkan bahwa sejak 2000 hingga 2017, Produk Domestik Bruto Indonesia (PDB) per kapita meningkat rata-rata 4 persen setiap tahun, setelah China dan India, yang masing-masing tumbuh 9 persen dan 5,5 persen per tahun. Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia memicu tingginya ketimpangan antarpenduduk.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ketimpangan di Indonesia mulai meningkat pada awal 1990-an. Krisis moneter 1998 sempat menurunkan ketimpangan di Indonesia karena krisis tersebut berdampak signifikan terhadap kalangan orang kaya pada saat itu. Namun, kesenjangan antara si kaya dan si miskin kembali meningkat cepat pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Indeks. Ketimpangan didorong oleh kelas konsumen. Laporan Bank Dunia pada 2015 menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya dinikmati oleh 20 persen

kelompok terkaya. Kelompok ini diidentifikasi sebagai kelas konsumen. Mereka adalah orang-orang yang berpendapatan bersih per tahun di atas 3.600 dollar AS atau Rp 52,6 juta dan pengeluaran per harinya sekitar 10 dollar AS hingga 100 dollar AS untuk makanan, transportasi, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Saat ini, setidaknya 70 juta orang di Indonesia termasuk dalam golongan kelas konsumen. Kelompok ini diproyeksikan akan mencapai 135 juta orang pada 2030 atau setengah dari total penduduk Indonesia. Sejak tahun 2000, kelas konsumen Indonesia sudah muncul dan terus berkembang kuat berkat pertumbuhan ekonomi selama dua dekade terakhir. Pendapatan mereka meningkat dikarenakan dua hal: kualifikasi pendidikan mereka tinggi dan permintaan pasar terhadap pekerja profesional terampil meningkat. Kelompok kelas konsumen ini berperan cukup penting bagi Indonesia, yaitu meningkatkan pendapatan pajak negara dan menuntut pelayanan publik yang lebih baik dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

5.2. Indeks Gini Ratio.

Menurut Maipita (2013) Gini Ratio merupakan suatu ukuran dimensi kunci dari pembangunan manusia. Mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu panjang umur dan sehat, akses terhadap pengetahuan dan standar hidup layak.

Indikator dari dimensi hidup panjang dan sehat adalah harapan hidup saat lahir, sedangkan indikator untuk dimensi akses terhadap pengetahuan adalah rata-rata lama sekolah (diukur dalam tahun) dan harapan sekolah (juga diukur dalam tahun). Indikator untuk dimensi standar hidup layak diukur melalui pendapatan Nasional bruto (PNB) yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli atau purchasing power parity (Maipita, 2013)

Indeks pembangunan manusia merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, yang diukur

dengan angka harapan hidup ketika lahir dan angka kematian bayi (Infant mortality rate); pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; dan standar hidup yang diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. Nilai indeks ini berkisar antara 0-100.

Dalam indeks pembangunan manusia terdapat tiga komposisi indikator yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu negara, yaitu :

- Tingkat kesehatan diukur harapan hidup saat lahir (tingkat kematian bayi).
- Tingkat pendidikan diukur dengan angka melek huruf (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga).
- Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per tahun.

Sumber Daya Manusia sebagai penyelenggara pembangunan, memegang peranan sentral demi terlaksananya pembangunan di suatu negara. Indonesia dikatakan memiliki bonus demografi memiliki peluang besar untuk dapat melaksanakan pembangunan. Sayangnya Indonesia hanya punya jumlah angkatan kerja yang melimpah, tetapi tidak dengan kualitas tenaga kerjanya. Berikut adalah gambaran fluktuasi perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia





Gambar 5.2 . Fluktuasi Indeks Gini Ratio di Indonesia

Dari Gambar 5.2, dapat dilihat bahwa pada periode tahun 2010-2017 terjadi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, hal ini mengindikasikan peningkatan kualitas manusia secara umum. Program yang dilakukan pemerintah misalnya penerapan wajib belajar selama 9 tahu, bantuan-bantuan berupa beasiswa untuk mahasiswa berprestasi berhasil mendorong masyarakat Indonesia untuk terus berpacu untuk meningkatkan kualitas diri.

Tapi hal ini akan berbeda jika membandingkan Gambar 5.1 dan Gambar 5.2, bahwa peningkatan Indeks Pembanguna Manusia belum berhasil menurunkan tingkat ketimpangan di Indonesia. Ternyata perkembangan industry yang high technology menuntut sumber daya manusia yang selalu berinovasi, tentu saja tenaga kerja ini dihasilkan dari perguruan-perguruan tinggi dikota.lantas bagaimana dengan nasib masyarakat dipedesaan yang tidak dapat mengakses sarana dan prasarana pendidikan? Kondisi inilah yang mengakibatkan ketimpangan semakin melebar.

Namun di sisi lain, mereka yang berpendidikan rendah semakin sulit mengakses lapangan kerja. Mereka terjebak dalam pekerjaan dengan gaji rendah. Banyak dari mereka adalah petani dan nelayan di daerah pedesaan dan mereka yang bekerja di sektor informal. Karena kenaikan upah mereka lebih lambat dibanding gaji pekerja terampil, ketimpangan ekonomi di Indonesia melebar. Ketimpangan ekonomi dan pembangunan manusia Tingginya ketimpangan ekonomi mengakibatkan kelompok berpendapatan rendah tidak mampu mengakses kebutuhan dan pelayanan dasar seperti makanan, kesehatan dan pendidikan. Ini bisa berdampak buruk bagi masyarakat dan memperlambat proses pembangunan manusia, yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).. Berdasarkan data IPM dari lembaga PBB, United Nations Development Programme (UNDP), Indonesia termasuk dalam kategori pembangunan manusia sedang. (Jatmiko, 2018)

5.3. Tingkat pengangguran sebagai dampak kemiskinan di Indonesia

Sebagai negara yang memiliki kepadatan penduduk yang besar, dimana usia angkatan kerja adalah golongan terbesar dari masyarakatnya, tentu saja membutuhkan lapangan kerja untuk dapat menyerap seluruh angkatan kerjanya. Berikut adalah fluktuasi tingkat pengangguran di Indonesia pada periode 2010-2017.



Gambar 5.3. Fluktuasi Tingkat Pengangguran di Indonesia

Dari Gambar 5.3, dapat dijelaskan bahwa terjadi penurunan tingkat pengangguran di Indonesia pada periode 2010-2017. Tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 7,3 % selanjutnya menurun hingga 5,4% pada tahun 2017. Artinya terjadi penurunan tingkat pengangguran sepanjang sepuluh tahun terakhir. Data ini menunjukkan peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kondisi berbeda jika dibandingkan dengan Gambar 5.1, yang menjelaskan ketimpangan semakin meningkat sepanjang tahun 2010-2017, artinya tingkat pengangguran yang menurun tidak mampu menurunkan tingkat ketimpangan di Indonesia. Bahwa penyerapan tenaga kerja yang terjadi adalah penyerapan tenaga kerja untuk golongan menengah bawah, dimana golongan ini memiliki pendapatan yang rendah. Sebagian besar masyarakat terjebak dalam golongan ini, misalnya kelompok petani, nelayan, buruh dan pegawai dengan upah dibawah standar upah minimum regional. Dengan tingkat pendapatan yang rendah masyarakat hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Hal berbeda terjadi pada golongan kecil masyarakat lainnya. Golongan masyarakat dengan tingkat pendidikan tinggi, sehingga banyak dibutuhkan oleh lapangan kerja, hanya ketersediaannya masih sangat terbatas. Umumnya pihak perusahaan akan membayar para pekerja pada kelompok ini dengan gaji atau upah yang tinggi, sehingga memiliki tingkat konsumsi yang tinggi. Golongan ini berasal dari tenaga kerja dengan kualitas pendidikan sarjana atau magister, memiliki ketrampilan tingkat tinggi, kemampuan Informasi Teknologi yang mumpuni. Untuk memenuhi tenaga kerja seperti ini tak jarang perusahaan akan mengimpor dari luar negeri. Akhirnya ketika hal ini berlangsung terus menerus, maka ketimpangan akan semakin meningkat.

5.4. Dana Alokasi Anggaran Pendidikan Penyebab Kemiskinan di Indonesia

Pengeluaran pemerintah adalah konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah serta pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk keperluan administrasi pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan (Sukirno, 2011). (Todaro and Smith, 2011) mengatakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk kepentingan publik, yaitu secara langsung berupa “pembayaran transfer” dan secara tidak langsung melalui penciptaan lapangan kerja, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan dan sebagainya. Sedangkan macam-macam pengeluaran pemerintah, yaitu:

- Pengeluaran yang self liquidating sebagian atau sepenuhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa-jasa dan barang-barang yang bersangkutan. Misalnya pengeluaran untuk jasa-jasa perusahaan pemerintah atau untuk proyek-proyek produktif.
- Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan-keuntungan ekonomi bagi masyarakat yang dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak yang lain akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah. Misalnya pengeluaran untuk

bidang pertanian, pendidikan, dan pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja, serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat.

- Pengeluaran yang tidak termasuk self liquidating dan reproduktif, yaitu pengeluaran yang langsung menambahkan kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya untuk bidang rekreasi, pendirian monument dan sebagainya.
- Pengeluaran yang merupakan penghematan dimasa akan datang, misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu, pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin pada dasarnya berunsurkan pos-pos pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan roda pemerintahan sehari-hari meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga barang), angsuran dan utang pemerintah, serta jumlah pengeluaran lain. Sedangkan pengeluaran pembangunan maksudnya adalah pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik, yang dibedakan atas pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek.

Dalam penelitian ini, pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan. Semakin besar pengeluaran pemerintah maka ketimpangan distribusi pendapatan juga semakin tinggi. Hal ini berarti pengeluaran pemerintah belum mampu menurunkantingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Pengeluaran yang tergolong belanja publik yang semestinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan dalam penelitian ini mengalami peningkatan. Ini disebabkan karena pengeluaran pemerintah belum sepenuhnya terjangkau atau dapat dinikmati oleh masyarakat secara langsung.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan dalam perekonomian suatu negara. Banyak factor yang dibutuhkan suatu negara untuk dapat melakukan pertumbuhan negaranya, salah satu diantaranya adalah factor modal. Dalam memenuhi kebutuhan modal untuk pertumbuhan ekonomi suatu daerah pemerintah selalu membantu dengan menyalurkan bantuan berupa dana alokasi umum. Tujuan pemeberian dana alokasi umum adalah untuk membantu daerah yang pendapatan bruto masih sedikit, sehingga membutuhkan modal untuk membangun daerahnya.

5.5. Membentuk Model kemiskinan di Indonesia

Untuk menjawab masalah dan mencapai tujuan penelitian ini, yaitu membentuk Model Kemiskinan di Indonesia , diperlukan uji-uji asumsi terlebih dahulu, selanjutnya diikuti dengan me run data untuk mendapatkan model. Berikut akan diuraikan tahapan seseuai dengan desain penelitian di bab 3.

5.5.1 Uji Kesesuaian Model Regresi Data Panel

Data panel adalah gabungan dari data time series dan data cross section, dimana cross section dalam penelitian ini berupa provinsi di Indonesia. Dengan menggunakan model regresi data panel dapat dimungkinkan untuk menangkap karakteristik antar individu dan antar waktu yang bisa saja berbeda. Analisis regresi dengan menggunakan data panel mempunyai beberapa keuntungan. Menurut Hsiao (1992), keuntungan-keuntungan menggunakan analisis regresi data panel adalah:

- Memperoleh hasil estimasi yang lebih baik karena seiring dengan peningkatan jumlah observasi yang otomatis berimplikasi pada peningkatan derajat kebebasan (degree of freedom)
- Menghindari kesalahan penghilangan variabel (omitted variable problem).

Menurut Baltagi ,1995, keuntungan-keuntungan menggunakan analisis regresi data panel antara lain:

- Mengatasi masalah heterogenitas individu (individual heterogeneity);
- Memberikan data yang lebih informatif, mengurangi masalah kolinieritas pada variabel, mengatasi masalah penghilangan variabel (omitted variabel), dan menghasilkan degree of freedom yang lebih besar;
- Mempelajari perubahan yang bersifat dinamis (dynamics of adjustment)
- Dapat mengidentifikasi dan menghitung efek yang tidak dapat dilakukan pada analisis time series atau cross section murni;
- Dapat mengurangi bias dalam pengestimasi karena data cukup banyak.

Model regresi data panel yang umumnya digunakan terdapat tiga macam, yaitu Common Effects Model (Pooled Least Square – PLS), Fixed Effects Model (Model Efek Tetap – MET), dan Random Effects Model (Model Efek Random – MER). Uji yang harus dilakukan untuk menentukan model regresi data panel yang terbaik adalah dengan melakukan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier (LM).

Common Effect

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 10/06/20 Time: 16:12

Sample: 2015 2019

Periods included: 5

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 170

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1871.401	561.8949	-3.330517	0.0011

X1	3518.123	1603.870	2.193521	0.0297
X2	0.029661	0.005616	5.281830	0.0000
X3	4.03E-08	5.34E-09	7.541108	0.0000

R-squared	0.417041	Mean dependent var	784.2434
Adjusted R-squared	0.406505	S.D. dependent var	1111.794
S.E. of regression	856.5104	Akaike info criterion	16.36686
Sum squared resid	1.22E+08	Schwarz criterion	16.44064
Log likelihood	-1387.183	Hannan-Quinn criter.	16.39680
F-statistic	39.58467	Durbin-Watson stat	0.322077
Prob(F-statistic)	0.000000		

Fixed Effect

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 10/06/20 Time: 16:15

Sample: 2015 2019

Periods included: 5

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 170

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1202.028	106.4149	11.29567	0.0000
X1	-114.7845	255.2645	-0.449669	0.6537
X2	-0.031535	0.003633	-8.680503	0.0000

X3 -2.65E-09 9.85E-10 -2.689725 0.0081

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.994951	Mean dependent var	784.2434
Adjusted R-squared	0.993585	S.D. dependent var	1111.794
S.E. of regression	89.05032	Akaike info criterion	12.00613
Sum squared resid	1054685.	Schwarz criterion	12.68862
Log likelihood	-983.5206	Hannan-Quinn criter.	12.28307
F-statistic	728.0537	Durbin-Watson stat	0.815909
Prob(F-statistic)	0.000000		

Random Effect

Dependent Variable: Y

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 10/06/20 Time: 16:16

Sample: 2015 2019

Periods included: 5

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 170

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
----------	-------------	------------	-------------	-------

C	1066.006	170.8881	6.238033	0.0000
X1	61.79222	253.6949	0.243569	0.8079
X2	-0.024404	0.003444	-7.085119	0.0000
X3	-2.46E-09	9.82E-10	-2.507790	0.0131

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	788.1967	0.9874
Idiosyncratic random	89.05032	0.0126

Weighted Statistics

R-squared	0.222365	Mean dependent var	39.57428
Adjusted R-squared	0.208312	S.D. dependent var	117.0039
S.E. of regression	104.1064	Sum squared resid	1799131.
F-statistic	15.82260	Durbin-Watson stat	0.443258
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	-0.343485	Mean dependent var	784.2434
Sum squared resid	2.81E+08	Durbin-Watson stat	0.002842

Model Housmen

Membandingkan Fixed Effect dan Random Effect

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	63.877694	3	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	114.784456	61.792218	798.815860	0.0000
X2	-0.031535	-0.024404	0.000001	0.0000
X3	-0.000000	-0.000000	0.000000	0.0163

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 10/06/20 Time: 16:23

Sample: 2015 2019

Periods included: 5

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 170

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1202.028	106.4149	11.29567	0.0000
X1	-114.7845	255.2645	-0.449669	0.6537
X2	-0.031535	0.003633	-8.680503	0.0000
X3	-2.65E-09	9.85E-10	-2.689725	0.0081

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.994951	Mean dependent var	784.2434
Adjusted R-squared	0.993585	S.D. dependent var	1111.794
S.E. of regression	89.05032	Akaike info criterion	12.00613
Sum squared resid	1054685.	Schwarz criterion	12.68862
Log likelihood	-983.5206	Hannan-Quinn criter.	12.28307
F-statistic	728.0537	Durbin-Watson stat	0.815909
Prob(F-statistic)	0.000000		

Fixed Effect lebih baik dari random effect karena sig < 0,05

Uji Chow

Uji ini dilakukan untuk menentukan model apakah Common Effect (CE) ataukah Fixed Effect (FE) yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis yang digunakan adalah:

H0: Pilih Common Effect (CE)

H1: Pilih Fixed Effect (FE)

Pengambilan keputusan untuk uji Chow adalah dengan melihat nilai probabilitas (Prob.) untuk Cross-section F. Jika nilainya $> 0,05$ maka model yang terpilih adalah Common Effect (CE), tetapi jika nilai Prob yang diperoleh $< 0,05$ maka model yang terpilih adalah Fixed Effect (FE).

Tabel 5.1 Hasil Uji Chow Test

Uji Chow

Pilihan Fixed atau Commod

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	461.329015	(33,133)	0.0000
Cross-section Chi-square	807.324606	33	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 10/06/20 Time: 16:18

Sample: 2015 2019

Periods included: 5

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 170

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
----------	-------------	------------	-------------	-------

C	-1871.401	561.8949	-3.330517	0.0011
X1	3518.123	1603.870	2.193521	0.0297
X2	0.029661	0.005616	5.281830	0.0000
X3	4.03E-08	5.34E-09	7.541108	0.0000

R-squared	0.417041	Mean dependent var	784.2434
Adjusted R-squared	0.406505	S.D. dependent var	1111.794
S.E. of regression	856.5104	Akaike info criterion	16.36686
Sum squared resid	1.22E+08	Schwarz criterion	16.44064
Log likelihood	-1387.183	Hannan-Quinn criter.	16.39680
F-statistic	39.58467	Durbin-Watson stat	0.322077
Prob(F-statistic)	0.000000		

model yang terpilih adalah fixed effect karena lebih kecil dari 0,05

Dari hasil pengolahan data uji chow yang disajikan pada tabel 5.5 diatas diperoleh nilai Prob. Cross-section F sebesar 0,000000 yang artinya bahwa nilai yang diperoleh adalah $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model Fixed Effect lebih tepat dibandingkan dengan model Common Effect.

5.5.2 Hasil Estimasi Regresi Data Panel dengan Metode Fixed Effect Model

Hasil uji model penelitian ini dengan menggunakan perangkat program Eviews 8.1. Penelitian ini menghadapi perilaku provinsi yang diregresi secara sistem (multi persamaan). Pada estimator ini, persamaan yang diestimasi terdiri dari 34 provinsi di Indonesia dengan waktu observasi tahunan (Annual) dari tahun 2010-2017.

Tabel 5.2 menyajikan hasil pengolahan data dengan menggunakan metode Fixed Effect. Dari hasil estimasi model penelitian selanjutnya akan di analisis uji statistik signifikansi dan analisis uji apriori ekonomi (arah dan kebermaknaan).

Tabel 5.2 Hasil Estimasi Model Persamaan Data Panel (Fixed Effect Model)

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 10/06/20 Time: 16:15

Sample: 2015 2019

Periods included: 5

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 170

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1202.028	106.4149	11.29567	0.0000
X1	-114.7845	255.2645	-0.449669	0.6537
X2	-0.031535	0.003633	-8.680503	0.0000
X3	-2.65E-09	9.85E-10	-2.689725	0.0081

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.994951	Mean dependent var	784.2434
Adjusted R-squared	0.993585	S.D. dependent var	1111.794
S.E. of regression	89.05032	Akaike info criterion	12.00613
Sum squared resid	1054685.	Schwarz criterion	12.68862
Log likelihood	-983.5206	Hannan-Quinn criter.	12.28307
F-statistic	728.0537	Durbin-Watson stat	0.815909

Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel 5.6 diatas dapat dituliskan secara umum Model Persamaan Ketimpangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

$\text{LOG (Kemiskinan)} = 1202,02 - 114,78 \text{ LOG (Indeks Gini Ratio)} - 0,03 \text{ LOG (pengeluaran bidang pendidikan)} - 2,65 \text{ LOG (pengeluaran bidang kesehatan)}$

Interpretasi dari bentuk persamaan diatas adalah apabila variabel-variabel bebas indeks gini ratio, pengeluaran bidang pendidikan dan pengeluaran bidang kesehatan diasumsikan nol, maka kemiskinan akan meningkat sebesar 1202,02%.

5.5.3 Analisis Uji Statistik Signifikansi

Berdasarkan output estimasi regresi data panel dengan metode fixed effect diatas maka dapat kita lakukan analisis uji statistik sebagai berikut:

- Uji Parsial / Partial Test (t-test)

Uji parsial variabel-variabel bebas dapat dilihat dari nilai probabilitinya. Jika nilai probabilitinya lebih kecil dari 5 % berarti variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tak bebas. Jika nilai probabilitinya lebih besar dari 5% berarti variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tak bebas.

Dari tabel hasil pengolahan dengan menggunakan Eviews 8.1 diatas dapat dilihat bahwa variabel bebas yaitu indeks gini ratio berpengaruh negative dan tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5% terhadap variabel tak bebas tingkat kemiskinan, sedangkan pengeluaran bidang pendidikan dan bidang kesehatan berpengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

- Uji Serentak / Overall (F-test)

Pengujian secara serentak dapat dilakukan dengan melihat Prob (F-statistic). Jika nilai probabiliti dari F-statistic lebih kecil dari 5% maka dapat dikatakan bahwa semua variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap perubahan pada variabel tak bebas. Sebaliknya, jika nilai probabiliti dari F-statistic lebih besar dari 5% maka dapat dikatakan bahwa semua variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan pada variabel tak bebas.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Prob(F-statistic) adalah sebesar 0.00000, lebih kecil dari 5% yang berarti bahwa variabel-variabel bebas indeks gini ratio, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan bidang kesehatan secara serentak mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap perubahan variabel tak bebas Indeks Williamson (Tingkat Ketimpangan).

- Koefisien Determinasi / Coefficient Determinant (R^2)

Dari nilai koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat apakah variasi perubahan dari nilai variabel tak bebas mampu dijelaskan secara serentak oleh variabel-variabel bebasnya. Nilai R^2 terletak diantara angka 0 dan 1. Nilai R^2 yang semakin mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas dalam model semakin menjelaskan variasi variabel tak bebas. Model dikatakan lebih baik kalau R^2 semakin dekat dengan 1 (Gujarati, 2004).

Dari tabel 5.2 diperoleh nilai R^2 sebesar 0.994951, menandakan bahwa variasi dari perubahan nilai variabel tak bebas kemiskinan mampu dijelaskan secara serentak oleh variabel-variabel bebasnya yaitu variabel indeks gini ratio, pengeluaran bidang pendidikan dan pengeluaran bidang kesehatan 0.994951% sedangkan sisanya sebesar 0,01 % dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak masuk dalam model.

5.5.4 Uji Asumsi Klasik

Model yang digunakan dalam penelitian ini merupakan regresi linier berganda, maka diperlukan adanya uji asumsi klasik untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran asumsi. Asumsi tersebut adalah tidak adanya heteroskedastisitas (heterocedasticity),

multikolinearitas (multicollinearity) dan autokorelasi (autocorrelation). Terpenuhi asumsi klasik diperlukan agar model dapat digunakan sebagai alat prediksi yang baik dengan memenuhi standar kondisi Best Linier Unbiased Estimation (BLUE). Uji Normalitas juga dilakukan pada data penelitian untuk melihat apakah data penelitian sudah mengikuti distribusi normal.

- Uji Heteroskedastisitas (Heteroscedasticity)

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Syarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas.

Tabel 5.3. Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESIDABS

Method: Panel Least Squares

Date: 10/06/20 Time: 16:57

Sample: 2015 2019

Periods included: 5

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 170

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-32.90538	50.28546	-0.654372	0.5140
X1	130.1438	120.6230	1.078930	0.2826
X2	0.004565	0.001717	2.659308	0.1088
X3	-6.19E-10	4.66E-10	-1.329665	0.1859

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.701794	Mean dependent var	39.47755
Adjusted R-squared	0.621077	S.D. dependent var	68.35963
S.E. of regression	42.07996	Akaike info criterion	10.50687
Sum squared resid	235506.2	Schwarz criterion	11.18936
Log likelihood	-856.0835	Hannan-Quinn criter.	10.78381
F-statistic	8.694459	Durbin-Watson stat	2.426142
Prob(F-statistic)	0.000000		

Untuk mendapatkan nilai heteroskedastisitas, maka kita harus melihat pengaruh residual absolut dan variabel X yang diteliti, Jika probability variabel X lebih besar dari 0,05 ($<0,05$) maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Salah satu uji yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah menggunakan uji Glejser, yaitu dengan menggunakan nilai absolut residual sebagai variabel dependen. Jika nilai probabiliti $<$ nilai $\alpha = 5\%$ maka dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai probabiliti $>$ nilai $\alpha = 5\%$ maka dikatakan telah terjadi heteroskedastisitas.

Dari hasil pengolahan dengan software Eviews 8.1 pada tabel 4. didapat bahwa semua koefisien variabel independen signifikan maka dapat disimpulkan tidak adanya pelanggaran asumsi heteroskedastisitas.

- Uji Multikolinieritas (Multicollinearity)

Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi panel ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model yang baik adalah model yang tidak terjadi korelasi antar variabel

independennya. Multikolinearitas muncul jika diantara variabel independen memiliki korelasi yang tinggi dan membuat kita sulit untuk memisahkan efek suatu variabel independen terhadap variabel dependen dari efek variabel lainnya. Hal ini disebabkan perubahan suatu variabel akan menyebabkan perubahan variabel pasangannya karena korelasi yang tinggi.

Tabel 5.4 Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1	0.331020515375241	0.1118170019152899
X2	0.331020515375241	1	0.1273030769126209
X3	0.1118170019152899	0.1273030769126209	1

Jika nilai < 0,08 maka data bebas dari multikolinearitas

- Analisis Uji Apriori Ekonomi (Arah Dan Kebermaknaan)

Uji apriori ekonomi menjelaskan bagaimana variabel bebas mempengaruhi variabel tak bebas dengan melihat nilai probabiliti dari nilai t-statistik untuk melihat tingkat signifikansi dan juga uji arah atas nilai koefisien dari masing-masing variabel bebas.

Model Persamaan Kemiskinan di Indonesia adalah sebagai berikut:

LOG (Kemiskinan) = 1202,02 – 114,78 LOG (Indeks Gini Ratio) -0,03 LOG (pengeluaran bidang pendidikan) -2,65 LOG (pengeluaran bidang kesehatan)

5.5.4 Pembahasan Hasil Penelitian

- Pengaruh Variabel Bebas Tingkat Gini Ratio

Hasil estimasi menghasilkan nilai koefisien untuk variabel bebas tingkat gini ratio sebesar - 114,78 dan bertanda negatif Hal ini dapat diartikan bahwa Tingkat gini ratio berpengaruh negative terhadap Tingkat

kemiskinan di Indonesia. Semakin tinggi tingkat gini ratio maka akan semakin menurun tingkat kemiskinan di Indonesia. Peningkatan tingkat gini ratio sebesar 1% akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 114,78 % dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap/ceteris paribus. Dilihat dari hasil pengujian terhadap nilai t-statistik diperoleh nilai probabiliti sebesar 0.6537. Nilai tersebut $> \alpha = 5\%$ yang berarti bahwa variabel tingkat gini ratio berpengaruh tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia pada tingkat keyakinan 95% ataupun 90%.

Indeks Gini ratio menunjukkan angka distribusi pendapatan, bagaimana distribusi pendapatan di Indonesia dan seluruh provinsi, dalam penelitian ini dihasilkan tingkat distribusi pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, jika dilihat dari arah pengaruhnya yang negative berarti semakin tinggi distribusi pendapatan, maka tingkat kemiskinan semakin turun, hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan arah teori, tetapi ternyata distribusi pendapatan ini tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Ketimpangan ekonomi di Indonesia melebar. Ketimpangan ekonomi dan pembangunan manusia. Tingginya ketimpangan ekonomi mengakibatkan kelompok berpendapatan rendah tidak mampu mengakses kebutuhan dan pelayanan dasar seperti makanan, kesehatan dan pendidikan (jatmiko, 2018).

- Pengaruh pengeluaran di bidang pendidikan

Hasil estimasi menghasilkan nilai koefisien untuk variabel bebas pengeluaran bidang pendidikan adalah sebesar -0.031535 dan bertanda negatif. Hal ini dapat diartikan bahwa pengeluaran bidang pendidikan berpengaruh negative terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Semakin tinggi jumlah pengeluaran bidang pendidikan maka akan semakin rendah tingkat kemiskinan di Indonesia. Peningkatan pengeluaran bidang pendidikan sebesar 1% akan menurunkan tingkat Kemiskinan di Indonesia sebesar 0,03 % dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap/ceteris paribus. Dilihat dari hasil pengujian terhadap nilai t-statistik diperoleh nilai probabiliti sebesar 0.0000. Nilai tersebut $< \alpha = 5\%$ yang berarti bahwa variabel pengeluaran bidang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia pada tingkat keyakinan 95% ataupun 90%.

Peningkatan pengeluaran bidang pendidikan di Indonesia akan mengakibatkan tingkat kemiskinan menurun, walaupun pengaruhnya tidak terlalu besar, tetapi pemerintah perlu terus memprioritaskan sektor pendidikan untuk pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai jalur, misalnya pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kualitas pembelajaran, misalnya laboratorium, sekolah, dan fasilitas ekstrakurikuler lainnya, bantuan operasional sekolah (BOS) yang diharapkan akan membantu masyarakat menengah kebawah, agar seluruh lapisan masyarakat dapat sekolah, melalui program wajib belajar selama sembilan tahun.

- Pengaruh pengeluaran di bidang kesehatan

Hasil estimasi menghasilkan nilai koefisien untuk variabel bebas pengeluaran bidang kesehatan sebesar -2,65 dan bertanda negative. Hal ini dapat diartikan bahwa pengeluaran bidang kesehatan berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Semakin tinggi jumlah pengeluaran bidang kesehatan maka akan semakin menurun tingkat Kemiskinan di Indonesia. Peningkatan pengeluaran bidang kesehatan sebesar 1% akan menurunkan tingkat Kemiskinan di Indonesia sebesar -2,65 % dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap/ceteris paribus. Dilihat dari hasil pengujian terhadap nilai t-statistik diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0081. Nilai tersebut $< \alpha = 5\%$ yang berarti bahwa variabel pengeluaran bidang kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia pada tingkat keyakinan 95% ataupun 90%.

Fungsi pemerintah sebagai penyedia jasa layanan umum, adalah mutlak dalam usaha peningkatan kesehatan masyarakat, yang berdampak peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan. Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan mengambil tempat besar dari APBN Indonesia, artinya pemerintah memandang sektor ini sangat penting dalam usaha pengentasan kemiskinan. Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dilakukan dalam banyak bidang, misalnya pembangunan pelayanan umum, seperti rumah sakit, puskesmas, laboratorium, penelitian bidang kesehatan, dan bantuan sosial seperti subsidi bagi peserta BPJS. Semua ini dilakukan pemerintah agar masyarakat selalu

dalam kesehatan yang baik, sehingga pemerintah bisa focus terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.



BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan.

- Factor penyebab terjadinya kemiskinan antar provinsi di Indonesia adalah variabel indeks Gini Ratio, dan pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan dan pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan .
- Indeks Gini Rati berpengaruh negative sebesar - 114,78 terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia, dan tidak signifikan karena nilai probability sebesar $0.6537 > 0,05$. Artinya peningkatan tingkat indeks gini ratio akan menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia.
- Pengeluaran Pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal ini dapat diartikan bahwa ketika pengeluaran bidang pendidikan meningkat maka tingkat kemiskinan di Indonesia akan menurun. Sedangkan nilai probailiti $0,003 < 0,05$.
- Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh kesehatan sebesar -2,65 terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia, dan signifikan karena nilai probability sebesar $0,0081 < 0,05$. Artinya peningkatan Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan akan meurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia.
- $LOG(\text{Kemiskinan}) = 1202,02 - 114,78 LOG(\text{Indeks Gini Ratio}) - 0,03 LOG(\text{pengeluaran bidang pendidikan}) - 2,65 LOG(\text{pengeluaran bidang kesehatan})$
- Menurunnya jumlah indeks gini ratio tidak mampu menurunkan tingkat kemiskinan, karena tenaga kerja yang diserap adalah tenaga kerja yang memiliki ketrampilan dasar dengan pendapatan yang rendah, akhirnya distribusi pendapatan masih belum merata.
- Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, adalah hal yang penting, tapi pengaruhnya sangat kecil dibanding dengan prioritas yang diberikan oleh pemerintah, artinya pengeluarn ini belum efektif dalam pelaksanaannya sehingga perlu diawasi setiap pos pengeluaran yang dilakukan agar tujuan peningkatan kualitas manusia tercapai.

- Penyaluran pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, belum optimal dimanfaatkan, sehingga masih berpengaruh kecil dibandingkan dengan besarnya pengeluaran yang dilakukan.

6.2. Saran

- Kebijakan peningkatan kualitas manusia melalui pendidikan , pelatihan yang diberikan oleh pemerintah adalah peltihan ketrampilan sehingga mendorong masyarakat menjadi produktif, sehingga bukan bantuan yang sifatnya konsumtif dan tidak berkelanjutan.
- Penyaluran bantuan operasional sekolah harus diawasi dengan ketat mekanisme pelaksanaannya, agar bukan menjadi ajang yang sia-sia
- Bantuan kesehatan berupa kartu BPJS dan subsidi lainnya, harus diberikan kepada yang betul-betul membutuhkan dan tepat sasaran

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2014) 'Konsep dan pengukuran pembangunan ekonomi', Lincolin Arsyad.
- Bappenas (2018) 'Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi', Kedeputusan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan.
- Bakri, Syafrizal, Hasdi Aimon. 2015. Analisis Ketimpangan Pembangunan antar Kabupaten / Kota di Sumatera Barat dan Kebijakan Penanggulangannya, Jurnal Kajian Ekonomi, Vol 4, No 7, 2015, Padang.
- Biro Pusat Statistik, 2004. Penduduk Fakir Miskin. Jakarta
- Bustomi MJ. 2012, ketimpangan pendidikan antar kabupaten/kota dan implikasinya di Provinsi Jawa Tengah, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.
- Biro Pusat Statistik Sumatera Utara, 2019, Sumatera Utara
- BPS (2020) Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020, Berita Resmi Statistik.
- Chambers, R. (1994) 'Participatory rural appraisal (PRA): Analysis of experience', World Development. doi: 10.1016/0305-750X(94)90003-5.
- Gujarati, D. N. (2004) Basic Econometrics 4th Edition, Tata McGraw-Hill.
- Hsiao, C. (2016) 'Dynamic panel data models', in Handbook of Empirical Economics and Finance. doi: 10.4337/9780857931023.00016.
- Kuncoro, M. (2004) Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang, Unisia.

- Kuncoro, Mudjarat. 2000. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : UPP-AMP.YKP
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Analisis Spasial dan Regional*. Yogyakarta: AMP YKPN
- Maipita, I, 2014, *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*, UPP STIM YKPN Yogyakarta *Pembangunan Perkotaan*". Prosiding-Forum Manajemen Perkotaan, Bandung Sen, Amartya
- Kumar. 2000. *Development as Freedom*. New York:Anchor Books.
- Maipita, I. (2018) 'SIMULASI DAMPAK KENAIKAN UPAH MINIMUM TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN DAN KEMISKINAN', *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*. doi: 10.24034/j25485024.y2013.v17.i3.347.
- Nurwati, N. (2008) 'Kemiskinan : Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan', *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*.
- Sjafrizal (2018) 'Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah', in *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*.
- Statistik, B. P. (2019) 'Profil Kemiskinan di Indonesia', *Berita Resmi Statistik*.
- Sukirno, S. (2011) *Teori Pengantar Makroekonomi*, Rajawali Press.
- Sumadio, D. D. and Rambli, D. R. A. (2010) 'Preliminary evaluation on user acceptance of the augmented reality use for education', in *2010 2nd International Conference on Computer Engineering and Applications, ICCEA 2010*. doi: 10.1109/ICCEA.2010.239.
- Sharp, A.M., Register, C.A., Grimes , P.W. (2000). *Economics of Social Issues 14th edition*, New York: Irwin/McGraw-Hill.

- Soegijoko, Budhy T. et al. 2001. "Pengelolaan Perkotaan dalam Menghadapi Tantangan
- Todaro, M. and Smith, S. C. (2011) Economic Development (11th ed.), Economic Development.
- V. et.al. 2001. Measuring education inequality : Gini coefficients of Education. Policy Research Working Paper. World Bank Institute. No. 2525.
- World Bank. 2006. Making the New Indonesia Work Fpr The Poor, The World Bank
- Yagami, F. 2013. Kesenjangan antara Harapan dengan Kenyataan. <http://www.slideshare.net/fitrayagami/kesenjangan-antara-harapan-dengan-kenyataan>
- Yusuf , A.A, 2020, Mengukur Ongkos Ekonomi Sesungguhnya Dari Pandemi Covid 19,Center of Sustainable Development Goals Studies, Universitas Padjajaran